

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 435.917.345,- atau mencapai 98.46 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 442.750.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp 11.544.078.542, atau mencapai 96.95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 11.907.467.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 (dalam Rupiah)

Uraian	2014			2013
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	442.750.000	435.917.345	98.46	110
Belanja Negara	11.907.467.000	11.544.078.542	96.95	99.09

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp 31.388.474.612,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 112.000.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 31.387.130.775.; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan Amortisasi Aset Lainnya) sebesar Rp 8.009.708.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 31.387.130.775,-

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 31.388.474.612,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 112.000. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 31.388.362.612.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	112.000	350.000	(238.000)	(68)
Aset Tetap	31.387.130.775	32.950.474.021	(1.563.343.246)	(4.74)
Piutang Jk Panjang	0	0	0	0
Aset Lainnya	1.231.837	856.667	787.585	63.9
Jumlah Aset	31.388.474.612	32.951.680.688	(1.563.206.076)	(4.74)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jk Pendek	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	112.000	350.000	(238.000)	(68.00)
Ekuitas Dana Investasi	31.388.362.612	32.951.330.688	(1.562.968.076)	(4.74)
Jumlah Ekuitas Dana	31.388.474.612	32.951.680.688	(1.563.206.076)	(4.74)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	31.388.474.612	32.951.680.688	(1.563.206.076)	(4.74)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Januari 2015
Kepala,

Drs. Muhammad Sabri
NIP 19680601 199603 1 002

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2014		% thd Anng	TA 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	442.750.000	435.917.345	98.46	702.950.214
Jum Pendpt Negara & Hibah		442.750.000	435.917.345	98.46	702.950.214
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	4.380.994.000	4.212.155.631	96.15	4.062.103.393
2. Belanja Barang	B.2.2.	6.476.473.000	6.283.552.911	97.02	5.542.050.449
3. Belanja Modal	B.2.3.	1.050.000.000	1.048.370.000	99.84	22.089.547.355
4. Belanja Sosial	B.2.4.	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara		11.907.467.000	11.544.078.542	96.95	31.693.701.197

II. NERACA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31
DESEMBER 2013

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	0	0
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	0	0
Persediaan	C.1.9	112.000	350.000
Jumlah Aset Lancar		112.000	350.000
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	20.354.582.994	18.966.909.994
Gedung dan Bangunan	C.2.3	22.500.275.687	22.500.275.687
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	445.395.000	445.395.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	503.508.000	503.508.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(12.416.630.906)	(9.465.614.660)
Jumlah Aset Tetap		31.387.130.775	32.950.474.021
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-lain	C.4.2	9.241.545	1.241.545
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(8.009.708)	(384.878)
Jumlah Aset Lainnya		1.231.837	856.667
JUMLAH ASET		31.388.474.612	32.951.680.688
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.4	0	0

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	0	0
Cadangan Persediaan	C.6.2	112.000	350.000
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.3	0	0
Ekuitas Dana Lancar Lainnya Barang/Jasa	C.6.4	0	0
yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa	C.6.5	0	0
yang Masih Harus Diserahkan	C.6.6	0	0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		112.000	350.000
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	31.387.130.775	32.950.474.021
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	1.231.837	856.667
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		31.962.665.352	32.951.330.688
JUMLAH EKUITAS DANA		31.388.474.612	32.951.680.688
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		31.388.474.612	32.951.680.688

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI PONTIANAK

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Dalam Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mengoptimalkan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia industri yang tangguh, Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Pontianak menetapkan rencana strategik organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Proses perumusan rencana strategik dilakukan secara sistematis, terarah, dan ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan SMTI serta peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul, ditetapkan sebagai tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi organisasi. Garis besar rencana strategik Sekolah Menengah Kejuruan –SMTI Pontianak tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Nilai – Nilai

Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Pontianak mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang akan menjadi budaya organisasi , yaitu :

- a. Disiplin
- b. Kreatif
- c. Inovatif
- d. Kerjasama
- e. Kekeluargaan

2. Visi

“Mewujudkan sekolah unggul dalam mengembangkan sumber daya manusia industri yang siap kerja, mandiri dan berdaya saing global”.

3. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan dengan masyarakat dunia usaha/ dunia industri dan instansi yang terkait
- b. Mengembangkan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha.
- c. Mengembangkan unit usaha sekolah dalam rangka mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa.

4. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru/aparatur dalam menunjang pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
- b. Meningkatkan mutu lulusan untuk mampu berkompetisi memasuki lapangan kerja nasional, regional dan internasional
- c. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi pada program keahlian kimia industri dan Teknik Proses Permesinan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pendidikan dan latihan untuk program Keahlian Kimia Industri dan Teknik Proses Permesinan.
- e. Meningkatkan Kemampuan lulusan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan mengelola Unit Bisnis Mandiri

f. Meningkatkan Kemampuan untuk mengikuti perubahan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Teknologi Informasi (TI)

g. Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan mutu produk yang berbasis bahan baku dari sumber daya alam (SDA) lokal

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan
Akuntansi atas
Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah Rp
435.917.345,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 435.917.345. atau mencapai 98.46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp442.750.000. Pendapatan Negara dan Hibah Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendidikan Pendidikan, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2014		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
2. Pendapatan Pendidikan	442.750.000	435.917.345	98.46
3. Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	442.750.000	435.917.345	98.46

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada TA 2014 mengalami Kenaikan sebesar 1.57 persen dari realisasi pendapatan dari PNBPN TA 2013.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013

URAIAN	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
2. Pendapatan Pendidikan	435.917.345	442.875.214	1.57
3. Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	435.917.345	442.875.214	1.57

Realisasi Belanja
Negara
Rp11.544.078.542

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak pada TA 2014 adalah sebesar Rp 11.544.078.542,- atau 96.95 persen dari anggaran senilai Rp11.907.467.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.380.994.000	4.212.155.631	96.15
Belanja Barang	6.476.473.000	6.283.552.911	97.02
Belanja Modal	1.050.000.000	1.048.370.000	99.84
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	11.907.467.000	11.544.078.542	96.95
Pengembalian Belanja		0	0
Belanja Netto	11.907.467.000	11.544.078.542	96.95

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami Penurunan sebesar 62.42 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran Tahun 2013 yang besar karena adanya Modal Pembangunan Gedung di SMK-SMTI Pontianak

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.212.155.631	4.062.103.393	3.56
Belanja Barang	6.283.552.911	5.542.050.449	11.80
Belanja Modal	1.048.370.000	22.089.547.355	(95.25)
Bantuan Sosial		0	0
Jumlah Belanja	11.907.467.000	31.693.701.197	(62.42)

Belanja Pegawai
Rp 4.212.155.631

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Lembur; Belanja Vakasi, Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 4.212.155.631. dan Rp 4.062.103.393. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2014 mengalami naik sebesar 3.56 persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya tunjangan sertifikasi guru.
2. Adanya kenaikan gaji PNS.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.055.986.231	3.795.332.793	6.42
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	100.252.000	100.771.000	(0.51)
Belanja Vakasi	55.917.400	165.999.600	(66.31)
Jumlah Belanja Kotor	4.212.155.631	4.062.103.393	3.56
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	4.212.155.631	4.062.103.393	3.56

Belanja Barang
Rp 6.283.552.911

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.283.552.911 dan Rp 5.542.050.449.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami kenaikan 11.80 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya penguatan kelembagaan internal dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	833.559.960	686.803.500	17.60
Belanja Barang Non Operasional	1.825.263.890	1.973.653.650	(7.51)
Belanja Jasa	980.133.959	598.187.635	38.96
Belanja Pemeliharaan	699.406.276	336.260.165	51.92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.869.887.876	1.852.926.699	0.90
Belanja Perjalanan Luar Negeri	75.300.950	94.218.800	(20.07)
Jumlah Belanja Kotor	6.283.552.911	5.542.050.449	11.80
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	6.283.552.911	5.542.050.449	11.80

Belanja Modal
Rp1.048.370.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 1.048.370.000. dan Rp 22.089.547.355

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami Penurunan sebesar 95.25 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun 2014 Belanja modal hanya ada pada pembelian Peralatan Mesin dan Kimia, sedangkan pada Tahun 2013 Belanja Modal lebih pada Pembangunan Gedung Sarana Pembelajaran di SMK-SMTI Pontianak

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A 2013	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.048.370.000	22.089.547.355	(95.25)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	1.048.370.000	22.089.547.355	(95.25)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	1.048.370.000	22.089.547.355	(95.25)

Belanja Bantuan
Sosial Rp 0

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2013. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Bantuan Sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

Lampiran A1

Sekolah Menengah Teknologi Industri SMTI Pontianak
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Peralatan dan Mesin		20.618.945.134	10.246.007.728	10.372.977.406
1	Alat Bantu	8		53.189.140	2.730.860
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	55.920.000	296.569.709	243.924.291
3	Alat Bengkel Bermesin	108	540.494.000	2.212.323.389	1.210.874.361
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	3.423.197.750	446.521.335	404.827.375
5	Alat Ukur	5	851.348.750	242.252.000	0
6	Alat Pengolahan	5	242.252.000	329.158.531	190.848.719
7	Alat Kantor	5	520.007.250	300.886.539	254.602.307
8	Alat Rumah Tangga	5	555.488.846	1.129.811.850	913.444.400
9	Alat Studio	5	2.043.256.250	208.518.350	18.423.150
10	Alat Komunikasi	5	226.941.500	21.107.300	110.700
11	Alat Kedokteran	5	21.218.000	28.785.000	6.000.000
12	Alat Unit Laboratorium	8	34.785.000	2.924.602.075	4.581.966.243
13	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	7.506.568.318	35.341.830	64.936.370
14	Alat Laboratorium Fisika Nuklir	15	100.278.200		
15	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	5.150.000	3.196.672	1.953.328
			290.000.000	164.642.860	125.357.140
16	Alat Laboratorium Hydrodinamika	15		139.744.005	1.202.015.995
17	Alat Laboratorium Standarisasi Instrumentasi	10	1.341.760.000	64.366.000	16.000.000
			80.366.000		
18	Persenjataan Non Senjata Api	3		29.746.465	14.949.285
19	Komputer Unit	4	44.695.750	1.166.070.000	162.350.000
20	Peralatan Komputer	4	1.328.420.000	183.067.500	30.737.500
21	Pengolahan dan Pemurnian	15	213.805.000	5.506.668	18.093.332
22	Alat SAR	2	23.600.000	8.000.000	0
23	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	8.000.000	213.160.775	888.574.725
24	Unit Peralatan Proses Produksi	8	1.101.735.500		
			59.657.020	39.439.695	20.217.325
B	Gedung dan Bangunan		22.500.275.687	2.086.694.978	20.413.540.709
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	22.500.275.687	2.086.694.978	20.413.540.709
C	Jalan dan Jembatan, irigasi dan Jaringan		445.392.000	217.462.500	227.932.500
1	Jalan	10	238.695.000	179.021.250	59.673.750
2	Bangunan Air Bersih	40	135.700.000	32.228.750	103.471.250
3	Instalasi Pembangkit Listrik	40	46.500.000	4.068.750	42.431.250
4	Jaringan Listrik	40	24.500.000	2.143.750	22.356.250
D	Aset Tetap Lainnya		503.508.000	53.540.000	449.968.000
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	312.500.000	0	312.500.000
2	Barang Bercorak Kesenian	4	191.008.000	53.540.000	177.468.000
E	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		9.241.545	8.009.708	1.231.837
1	Alat bengkel bermesin	10	8.000.000	7.600.000	400.000
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	1.241.545	409.708	831.837
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap			44.068.123.821	12.603.705.206	31.464.418.615
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			44.077.365.366	12.611.714.914	31.465.650.452

Lampiran A2

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA ACRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2014

BA : 019 Kementerian Perindustrian
Eselon 1 / UAPPA-E1 : 01 Sekretariat Jenderal
UAPPA-W : 1300 Kalimantan Barat
Satuan Kerja/UAKPA : 522489 Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak

No.	Pendapatan / Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1							
2							
3							

Pontianak, Januari 2015
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MUHAMMAD SABRI
NIP. 196806011996031002